

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teory

2.1.1 *Stewardship Theory*

Stewardship theory merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana pegawai/manajer lebih termotivasi bekerja untuk kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan individu (Donaldson, 1989). Teori ini juga menggambarkan situasi dimana manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Menurut Mardiasmo (2009) menjelaskan dalam konteks organisasi sektor publik, akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah sebagai pemegang amanah (*steward*) untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada rakyat sebagai pihak pemberi amanah (*principal*) dengan mengungkap segala informasi, baik keberhasilan maupun kegagalan yang dialami oleh organisasi tersebut.

Stewardship mengasumsikan dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai *steward* mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai *principal* dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai *steward* yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajiban tertentu yang ditentukan oleh para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai *principal*, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam

hubungan keagenan, pemerintah sebagai agen harus melaksanakan apa yang menjadi kepentingan para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai suatu hubungan keagenan (Rosalin, 2011).

2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah Laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Menurut Halim (2007), laporan keuangan daerah merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu. Istilah laporan keuangan pemerintah daerah meliputi semua laporan dan berbagai penjelasan yang mengakui laporannya tersebut akan diakui sebagai laporan keuangan.

Karakteristik kualitatif dari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam menyajikan laporan keuangan perusahaan. FASB dalam SFAC No. 2 menyebutkan bahwa karakteristik karakteristik kualitatif dimaksudkan untuk memberi kriteria dasar dalam memilih alternatif metode akuntansi dan pelaporan keuangan serta persyaratan pengungkapan (*disclosure*). Kriteria tersebut digunakan untuk menunjukkan jenis informasi yang relevan dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) juga menekankan pentingnya karakteristik kualitatif dari informasi keuangan yang dihasilkan agar informasi tersebut benar-benar bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Karakteristik

kualitatif yang digunakan oleh IAI adalah relevan, keandalan (*reliability*), dan daya banding (*comparability*), dapat dipahami (*understandability*).

Dalam memenuhi keinginan pemakai laporan, akuntansi keuangan perlu berupaya untuk membentuk dirinya agar lebih bermanfaat dan berguna. Oleh karena itu perlu kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan tersebut yaitu keinginan para pemakai laporan keuangan (Harahap, 2008). Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah sebagai berikut: “Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.” Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki Berikut penjelasan mengenai karakteristik kualitatif laporan keuangan:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan: Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*) Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa

lalu, Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini, Tepat waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan, dan Lengkap Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: Penyajian Jujur yaitu Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan, Dapat Diverifikasi (*verifiability*) yaitu Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh dan Netralitas yaitu Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dilakukan dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan guna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.3 Komponen Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Adapun penjelasannya seperti berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja transfer dan pembiayaan.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari: Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dan peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

c. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah.

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, inventaris aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang mencakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut :

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/daerah.

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk mengungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Selain keempat komponen laporan keuangan di atas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

mengatakan bahwa entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

a. Laporan Kinerja Keuangan Laporan kinerja keuangan adalah laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual. Dalam laporan dimaksud, perlu disajikan informasi mengenai pendapatan operasional, belanja berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi, dan surplus atau defisit. Laporan Kinerja Keuangan sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos sebagai berikut: Pendapatan dari kegiatan operasional, beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan klasifikasi ekonomi dan Surplus atau defisit.

b. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos sebagai berikut :

- 1) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.
- 2) Setiap pos pendapatan dan belanja beserta totalnya seperti diisyaratkan dalam standar-standar lainnya, yang diakui secara langsung dalam ekuitas.
- 3) Efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasar diatur dalam suatu standar terpisah.

Indonesia memasuki era pemerintahan daerah yang baru, maksudnya setiap daerah diberi kewenangan untuk menjelaskan berdasarkan PAD. Perubahan yang cukup fundamental terjadi di dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan konsep otonomi daerah yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal ini tentunya membawa perubahan juga terhadap pengelola keuangan negara sehubungan dengan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah mengatur sendiri mengenai pengelolaan keuangan daerahnya.

Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mesyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar lebih *accountable* dan semakin diperlukannya peningkatan kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan

pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan terhadap standar akuntansi, kapabilitas sumber daya manusia, serta dukungan sistem akuntansi yang ada.

Menurut Badjuri dan Trihapsari (2004) Tujuan penting reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Akuntabilitas dan transparansi tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan aparatur pemerintah berjalan dengan baik (Andrian, 2010). Pemerintah daerah berkewajiban mempublikasikan informasi berdasarkan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, informasi yang dipublikasikan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pemakai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat dipahami dan digunakan oleh pemakai informasi tersebut.

2.1.4 Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Bastian, 2007). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. SAP aspek penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dan pelaporan keuangan pemerintahan. Stadler, C., & Nobes, C. W. (2018), Adapun akuntansi untuk hibah pemerintah berdasarkan Standar Pelaporan Keuangan Internasional menunjukkan

bahwa hibah aset secara ekonomis penting bagi beberapa perusahaan dan frekuensi hibah berbeda secara signifikan di seluruh negara perusahaan dapat menunjukkan hibah sebagai pendapatan ditangguhkan atau bersih terhadap aset pilihan kebijakan harus dihapus dari standar akuntansi.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) harus mengacu pada Peraturan Pemerintah yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sampai dengan tahun anggaran 2013, pemerintah daerah masih menerapkan SAP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. perbedaan fundamental Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 terletak pada basis pencatatan transaksi dan jenis laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Untuk mencapai hal tersebut, standar akuntansi pemerintah menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan (Zeyn, 2011).

Penyusunan SAP sendiri disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan, yang selanjutnya disebut PSAP. SAP tercantum dalam dua lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu:

1. SAP Berbasis Akruwal

Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akruwal, yaitu SAP yang mengakui beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akruwal, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. SAP Berbasis akruwal tersebut dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan kerangka konseptual Akuntansi Pemerintahan, yaitu pelayanan publik serta nomor rekening perkiraan yang digunakan. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh atas penerapan basis akruwal, baik bagi pengguna laporan maupun bagi pemerintah sebagai penyedia laporan keuangan. Manfaat tersebut antara lain :

- a. Dapat menyajikan laporan posisi keuangan pemerintah dan perubahannya.
- b. Memperlihatkan akuntabilitas pemerintah atas penggunaan seluruh sumber daya.
- c. Menunjukkan akuntabilitas pemerintah atas pengelolaan seluruh aktiva dan kewajibannya yang diakui dalam laporan keuangan.
- d. Memperlihatkan bagaimana pemerintah mendanai aktivitasnya serta memenuhi kebutuhan kasnya.

- e. Memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah dalam mendanai aktivitasnya serta dalam memenuhi kewajiban dan komitmennya.
 - f. Membantu pengguna dalam pembuatan keputusan tentang penyediaan sumber daya atau melakukan bisnis dengan entitas.
 - g. Pengguna dapat mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal biaya pelayanan, efisiensi dan penyampaian pelayanan tersebut.
2. SAP Berbasis Kas Menuju Akruwal

SAP Berbasis Kas Menuju Akruwal dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. PSAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP Berbasis Kas Menuju Akruwal tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini dapat diberlakukan untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sampai dengan tahun anggaran 2014. Sebelumnya, SAP Berbasis Kas Menuju Akruwal digunakan dalam SAP berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akruwal belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 terdiri dari :

1. PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

2. PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran berbasis Kas.

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit- LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah dalam periode mendatang.

3. PSAP No. 03 Laporan Arus Kas.

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transtoris.

4. PSAP No. 04 Catatan atas laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas.

5. PSAP No. 05 Akuntansi Persediaan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

6. PSAP No. 06 Akuntansi Investasi.

Suatu pengeluaran kas atau aktiva dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria yaitu sebagai berikut :

- a. Kemungkinan manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai. Pengeluaran untuk investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan

realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

7. PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap.

Akuntansi Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur secara andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria berwujud, mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan, biaya pemerolehan dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan dijual dalam operasi normal entitas, diperoleh atau digunakan dengan maksud untuk digunakan.

8. PSAP No. 08 Akuntansi Kontruksi dalam pengerjaan.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peraltan, dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, serta aset tetap lain yang proses pemerolehannya/ pembangunannya membutuhkan waktu tertentu, dan belum selesai. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomis masa yang akan datang berkaitan dengan aktiva tersebut akan diperoleh.
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal.
- c. Aktiva tersebut masih dalam proses pengerjaan.

9. PSAP No. 09 Akuntansi Kewajiban.

Suatu kewajiban yang diakui besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

10. PSAP No. 10 Koreksi kesalahan.

Koreksi adalah tindakan pembetulan agar pos-pos yang tersaji sesuai dengan seharusnya. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dilakukan dengan pembetulan, pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

11. PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasian.

Laporan Keuangan Konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAI, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

12. PSAP No. 12 Laporan Operasional.

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu

periode pelaporan. Unsur yang mencakup dalam Laporan Operasional adalah pendapatan-LO, beban, transfer dan pos-pos luar biasa.

Penerapan SAP mewajibkan setiap entitas pelaporan, yang dalam hal ini termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antara generasi dan evaluasi kinerja. Melalui penerapan SAP akan dapat disusun laporan keuangan yang useful. Kegunaan laporan keuangan ditentukan oleh isi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Agar laporan keuangan berisi informasi yang bermakna maka laporan keuangan harus disusun berpedoman pada SAP.

2.1.5 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Abdul Halim (2007) definisi dari akuntansi keuangan daerah adalah Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi). Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bagian akuntansi, maka di dalam akuntansi keuangan daerah juga terdapat proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan ekonomi yang terjadi di pemerintah daerah. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 secara garis besar terdiri atas empat prosedur yaitu :

1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas meliputi pencatatan, penggolongan peringkasan dan pelaporan keuangan dalam proses mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas. Fungsi yang terkait adalah fungsi akuntansi pada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Dokumen yang digunakan adalah Bukti Transfer, STS, Nota Kredit Bank, dan Buku Besar Kas.

2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas meliputi pencatatan, penggolongan peringkasan dan pelaporan keuangan dalam proses mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas. Fungsi yang terkait adalah fungsi akuntansi pada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Dokumen yang digunakan adalah SP2D, nota debit bank, dan bukti pengeluaran kas lainnya.

3. Prosedur Akuntansi Aset Tetap

Prosedur Akuntansi Aset Tetap meliputi pencatatan, penggolongan peringkasan dan pelaporan keuangan dalam proses mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan aset tetap yang digunakan. Fungsi yang terkait adalah fungsi akuntansi pada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Bukti transaksi yang digunakan adalah berita acara penerimaan barang, surat keputusan penghapusan barang, surat keputusan mutase barang, berita

acara pemusnahan barang, berita acara penyerahan barang, berita acara penjualan, berita acara penyelesaian. Fungsi Akuntansi membuat buku memorial memuat nama aset tetap, kode rekening, klasifikasi aset, nilai, dan transaksi yang kemudian dicatat ke dalam jurnal.

4. Prosedur Akuntansi Selain Kas

Prosedur Akuntansi Selain Kas meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan keuangan transaksi kejadian selain kas. Akuntansi Selain Kas dapat berupa akuntansi piutang, akuntansi persediaan, akuntansi investasi, akuntansi kewajiban, dan akuntansi ekuitas. Fungsi yang terkait adalah fungsi akuntansi pada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Dokumen yang digunakan adalah bukti memorial, jurnal, buku besar, dan buku besar pembantu.

Menurut Kemendagri No.29 tahun 2002 indikator penerapan sistem akuntansi keuangan daerah mencakup :

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sistem akuntansi keuangan daerah harus mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku saat ini yaitu berbasis akrual. Basis akrual yaitu mengakui transaksi keuangan pada saat terjadinya, yaitu ketika sudah menjadi hak atau kewajibannya meskipun belum diterima atau dikeluarkan kasnya.
2. Prosedur Pencatatan Akuntansi berdasarkan Standar Pencatatan yang berlaku Umum. Transaksi-transaksi yang terjadi dalam dilakukan berdasarkan standar pencatatan yang berlaku umum. Setiap transaksi keuangan yang terjadi dilakukan analisis transaksi. Transaksi yang terjadi

juga harus disertai bukti transaksi. Pencatatan transaksi juga harus dilakukan secara kronologis.

3. Pembuatan Laporan Keuangan secara Periodik. Laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan. Laporan keuangan dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah. Laporan keuangan yang dibuat juga harus dilaporkan secara periodik guna kepentingan pengambilan keputusan.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 64 Tahun 2013). Berkaitan dengan laporan keuangan, sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Setiap proses akuntansi yang terjadi di lingkungan satuan kerja akan tercermin dalam laporan keuangan.

2.1.6 Sumber Daya Manusia

Menurut Nawawi (2001) Sumber daya manusia yaitu Manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, tenaga kerja, dan lain-lain. Sumber Daya Manusia adalah satu kesatuan tenaga manusia yang dalam organisasi dan bukan hanya sekedar penjumlahan karyawan-karyawan yang ada Matindas (2002). Sebagai kesatuan, sumber daya manusia harus dipandang sebagai suatu sistem di mana tiap-tiap karyawan

berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia diukur berdasarkan latar belakang pendidikan yang diperoleh pegawai.

M.T.E Hariandja (2002) menjelaskan bahwa Sumber Daya Manusia adalah salah satu faktor pada suatu perusahaan dilihat dari faktor lainya selain modal. Maka dari itu SDM sangat diperlukan untuk dikelola dengan baik agar efektivitas dan efesiensi organisasi semakn meningkat baik. Menurut Keputusan Kepala BKN No 46A Tahun 2007 Kompetensi Sumber Daya Manusia diukur dengan 3 indikator yaitu :

1. Pengetahuan, yaitu informasi yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan tugasnya. Pengetahuan umumnya diperoleh seseorang dari pengalaman yang dimiliki atau diperoleh dari informasi yang disampaikan oleh seseorang. Pegawai yang memiliki pengetahuan yang cukup dapat membantu mencapai tujuan dan menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas yang diberikan.
2. Keterampilan, yaitu kecakapan seseorang untuk mampu menggunakan ide dan pengetahuannya dalam melakukan dan menyelesaikan tanggungjawab yang diberikan sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan.
3. Sikap, yaitu respon terhadap tugas yang diberikan. Sikap pegawai yang mendukung keberhasilan pencapaian tujuan organisasi adalah bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah diberikan dengan segala resikonya.

Berdasarkan penjelasan dan pengertian diatas menurut bebrapa ahli dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan suatu kompeten atau kemampuan yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia agar dapat

dimanfaatkan dan dipratikkan untuk efektivitas dan pencapaian yang akan dicapai dalam suatu kelompok atau organisasi.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting untuk diungkapkan karena sebagai landasan informasi dan bahan acuan peneliti ini. Penelitian –penelitian terdahulu yang mengenai Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sumber Daya Manusia Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu (RESEACH GAP)

No	Judul	Jurnal Penerbit dan Tahun Penelitian	Variable	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penerapan Sistem Standar Akuntansi Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi pada pemerintah daerah kota dumai).	Triwahyuni, 2016	Variabel Independen : 1. Standar Akuntansi Pemerintahan 2. Kompetensi Sumber Daya Manusia 3. Standar Akuntansi Daerah Variable Dependen : 1. Kualitas Laporan Keuangan	1. Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan 2. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan 3. Standar Akuntansi Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

2.	Faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Yuliani, 2016	<p>Variabel Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi Sumber Daya Manusia 2. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan <p>Variabel Dependen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas Laporan Keuangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan 2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan 3. Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan 4. Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah
3.	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY.	Pujanir, 2017	<p>Variable Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi Sumber Daya Manusia 2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 3. penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah <p>Variable Dependen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualita Laporan Keuangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan 2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dan 3. penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuang

4.	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderisasi.	Andelina, 2017	<p>Variable Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 2. Kompetensi Sumber Daya Manusia <p>Variable Dependen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas Laporan Keuangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 2. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan
5.	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemeritahan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kompetensi Sumer Daya Mausia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SPKD (Studi Pada pemeritah daerah Kabupaten Kampar). Yuwilia, 2017	Triwadana, 2017	<p>Variable Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Standar Akuntansi Pemeritahan 2. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 3. Kompetensi SumerDaya Mausia <p>Variabel Dependen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas Laporan Keuangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Standar Akuntansi Pemeritahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan 2. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan 3. Kompetensi Sumer Daya Mausia berpengaruh positif terhadap Kualitas Lapora Keuangan
6.	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Yuwilia, 2017	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi Sumber Daya Manusia 2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan 2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

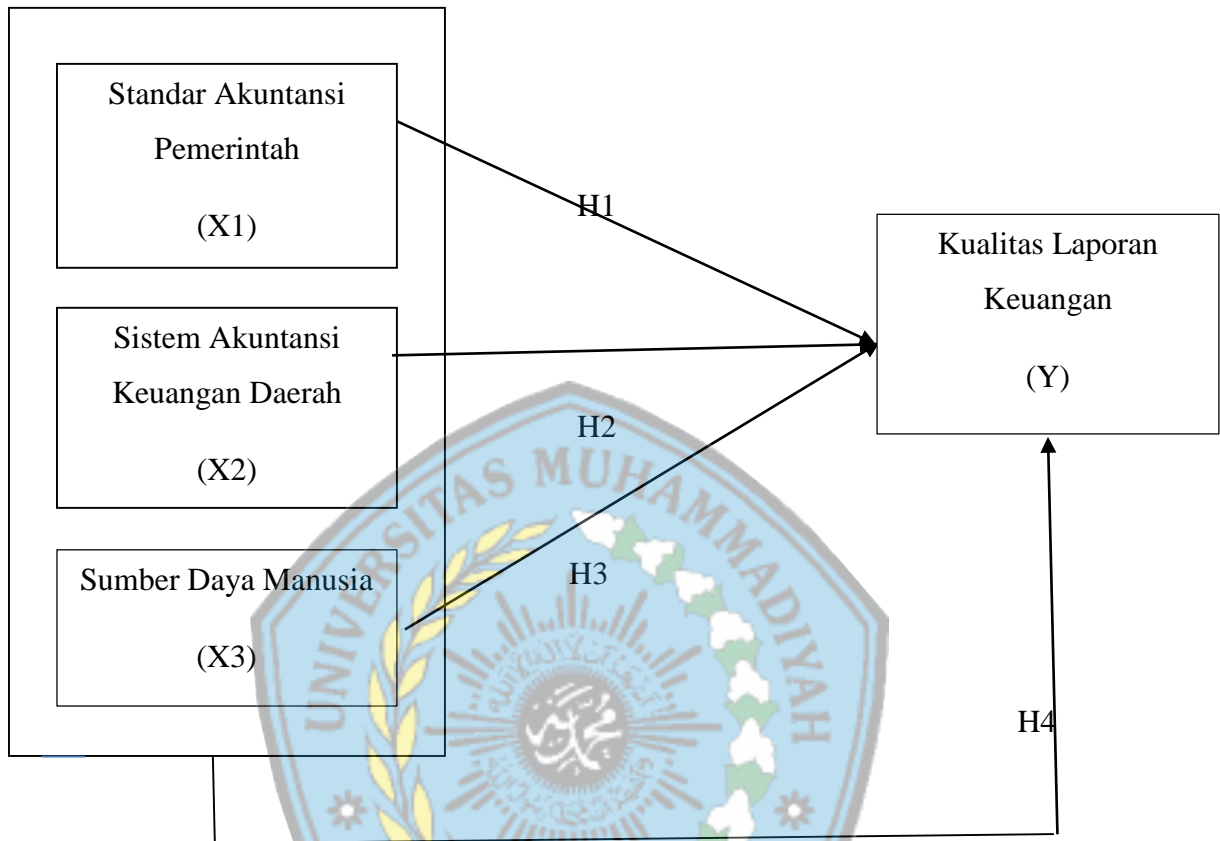
	Pemerintah Daerah (Studi empiris pada SKPD kabupaten lebuhan batu)		Variabel Dependen 1. Kualitas Laporan Keuangan	berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuanngan
7.	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi (Studi Pada SPKD Kabupaten Kampar	Sanjaya, 2017	Variable Independen: 1. Standar Akuntansi Pemerintahan 2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 3. Sumber Daya Manusia. Variable Dependen : 1. Kualitas Laporan Keuangan	1. Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 3. Sumber Daya Manusia berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan
8.	Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Manado.	Maramis, 2018	Variable Independen : 1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Variabel Dependen : 1. Kualitas Laporan Keuangan	1. Sistem Akuntansi Keuang Daerah berpengaruh negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan
9.	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi kasus pada satuan kinerja perangkat daerah kota bandung).	Oktavia, 2019	Variabel Independen : 1. Kompetensi Sumber Daya Manusia 2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	1. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah 2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh negatif terhadap

			Variable Dependen : 1. Kualitas Laporan Keuanga	Kualitas Laporan Keuangan Daerah
10.	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kode Etik Akuntan, Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.	Marwadi, 2020	Variabel Independen : 1. Kompetensi Sumber Daya Manusia 2. Standar Akuntansi Pemerintah 3. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Variabel Dependen : 1. Kualiatas Laporan Keuangan	1. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpegaruh signifikan terhadap Kualita Laporan Keuangan Daerah 2. Standar Akuntansi Pemerintah berpegaruh negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah 3. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpegaruh negatif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sumber daya manusia. Sedangkan variabel dependennya adalah Kualitas Laporan Keuangan. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.4 Perumusan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris (Sugiyono,2010). Berikut ini penjelasan tentang hubungan anatar variabel dan masing-masing hipotesis dalam penelitian ini:

2.4.1 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman penyajian laporan keuangan. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap pengelolaan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan, disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005. Menurut Yuliani (2016) membuktikan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Bukti penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Kusumah (2012) yang menyatakan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintahan, maka akan terjadi peningkatan kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

H1: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.4.2 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran

pendapatan belanja daerah (APBD). Menurut Herawati (2014) hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Bukti penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Pujanaira (2017) yang menyatakan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik dalam menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah maka semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

H2 : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.4.3 Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi, atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Hullah 2012). Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Menurut Hertati (2015) menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Bukti penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Andini (2015), yang menyatakan sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti semakin baik kompetensi sumber daya manusia, maka akan

meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

H3: Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.4.4 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah

Berdasarkan *teory Stewardship* kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat berpengaruh terhadap variabel-variabel yang dijelaskan sebelumnya. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban mengelola dan melaporkan penggunaan dana yang telah dilakukan secara sistematis pada suatu periode pelaporan. Pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan laporan keuangan tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam bidang akuntansi. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah juga penting dilakukan dalam menyusun laporan keuangan. Pemerintah juga harus menyampaikan pertanggungjawaban laporan keuangan tersebut secara baik dan benar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaruh sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

H4: Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sumber Daya Manusia berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

